

## **ABSTRAK**

### **PENGAWASAN OLEH BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BPLHD) TERHADAP PENGELOLAAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PT INDO LAMPUNG PERKASA KABUPATEN TULANG BAWANG**

**Oleh:  
Eka Purnama Sari**

Pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair perusahaan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD) Kabupaten Tulang Bawang belum optimal. Hal ini disebabkan karena masih terjadinya pelanggaran pengelolaan limbah cair perusahaan yang terjadi pada PT Indo Lampung Perkasa, dengan pelanggaran masih terciumnya bau yang menyengat di area sekitar kolam pembuangan limbah. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang No. 44 Tahun 2011 menyatakan bahwa tugas pokok BPLHD adalah membantu bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan permasalahan: a. Bagaimanakah pengawasan BPLHD terhadap Pengelolaan Pembuangan Limbah cair PT Indo Lampung Perkasa Kabupaten Tulang Bawang? b. Apakah Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan bagi BPLHD terhadap pengelolaan limbah cair PT Indo Lampung Perkasan Kabupaten Tulang Bawang? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara preventif dan represif. Pengawasan secara preventif adalah melakukan kunjungan rutin ke perusahaan dan mewajibkan perusahaan membuat laporan-laporan yang berkaitan dengan pembuangan limbah cair serta menyerahkan laporan PROPER perusahaan. Pengawasan secara represif dilakukan secara insidental dalam hal pengaduan/ laporan dari masyarakat baik perorangan maupun kelompok (LSM). Faktor-faktor penghambat bagi BPLHD yakni keterbatasan dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta minimnya jumlah tenaga ahli/ Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di bidang pengawasan lapangan, penataan dan petugas pemeriksa.

Kata kunci : Pengawasan, pengelolaan limbah dan Perusahaan Industri (PT).